



2022

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

**PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**

KATA PENGANTAR

Agenda Reformasi Birokrasi menjadi salah satu agenda utama di Lembaga Administrasi Negara, tidak hanya di level pusat tapi juga di level kompartemen. Puslatbang PKASN sebagai salah satu kompartemen LAN berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitasnya melalui berbagai inovasi dalam melaksanakan tugas pelatihan dan pengembangan ASN serta pengkajian di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN.

Pelaksanaan RB di LAN telah memasuki tahap 5.0 yaitu pemantapan pelaksanaan RB berbasis outcome dimana program RB dan/atau inovasi dapat benar benar memberi manfaat serta nilai tambah bagi organisasi, stakeholders, maupun sasaran pembangunan nasional.



Untuk memberikan gambaran komprehensif atas pelaksanaan program RB, sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Puslatbang PKASN pada Tahun 2022, Tim RB Kompartemen Puslatbang PKASN menyusun Laporan Pelaksanaan RB Tahun 2022. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk komitmen seluruh komponen di lingkungan Puslatbang PKASN LAN untuk mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan LAN Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si dan seluruh pimpinan JPT Madya LAN dan Tim Reformasi Birokrasi LAN yang sudah memberikan arahan dan bimbingan, serta Tim RB Puslatbang PKASN yang telah melaksanakan Rencana Aksi RB sehingga proses reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 dapat menjadi bahan evaluasi dan feedback untuk peningkatan capaian reformasi birokrasi tahun selanjutnya.

Sumedang, 30 Desember 2022
Ketua Tim RB Kompartemen Puslatbang PKASN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Riyadi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Susunan Tim RB Kompartemen	3
BAB II PELAKSANAAN PROGRAM RB	4
A. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui Penggunaan Perangkat Lunak Komputer Kendali Jarak Jauh.....	4
B. Pelatihan dan Penerapan Work Life Balance untuk Pegawai	5
C. Penataan Dokumen, Sosialisasi dan Konsultasi Produk Hukum	6
D. Memperkuat Institusional Branding Melalui Pengembangan Media Sosial di Lingkungan Puslatbang PKASN	9
E. LAN Commentaries	10
F. PELANGI (PELAYaNan Arsip DiGItal) di Central File Puslatbang PKASN	12
G. Pembangunan Flexible Micro Learning dalam Konteks Penguatan Penataan Manajemen SDM	13
H. Peningkatan disiplin dan komitmen ASN Berakhlak di lingkungan Puslatbang PKASN melalui Program Pegawai Teladan	15
I. Penguatan peran dialog kinerja atasan - bawahan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai	16
J. Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Puslatbang PKASN	17
K. Sosialisasi Dokumen SAKIP Puslatbang PKASN 2020 – 2024	18
L. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Melalui Berbagai Media Dan Monitoring Dan Evaluasi Anggaran, Kegiatan Dan Kinerja Secara Berkala	19
M. Peningkatan Kapasitas Pengelola Akuntabilitas Kinerja	20
N. Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah) pada pelaksanaan program dan kegiatan	21
O. Pembangunan LAN yang bersih dan bebas KKN	25
P. Penyempurnaan dan implementasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan di setiap unit kerja pelayanan	28

Q. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan	30
R. Survey Kepuasan Terhadap Kualitas Layanan Puslatbang PKASN	31
S. Program Magang (Kampus Merdeka)	32

BAB III PRESTASI TAHUN 2022 **34**

BAB IV PENUTUP **37**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Manajemen Perubahan, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan (Deregulasi) dan Pelayanan

Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja dan pengawasan yang ketat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Roadmap RB nasional yang berlaku lima tahunan. Saat ini kita sudah berada pada tahap ketiga sekaligus tahap akhir dalam koridor grand design RB nasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Roadmap tersebut kemudian dijuvantahkan dalam Roadmap RB LAN Tahun 2020–2024 melalui PerkaLAN Nomor 12 tahun 2020.

Melalui Roadmap RB nasional maupun Roadmap RB LAN, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran RB, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Pelaksanaan RB di lingkungan LAN telah berjalan secara berkelanjutan, termasuk di level kompartemen. Puslatbang PKASN sebagai salah satu kompartemen di LAN akan terus berkomitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi dengan berbagai strategi dan inovasi untuk mewujudkan sasaran RB.

Diharapkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Puslatbang PKASN dapat memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder dan dapat mewujudkan visi Puslatbang PKASN yaitu “Mewujudkan Pengembangan Kompetensi ASN Berkelas Dunia”.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

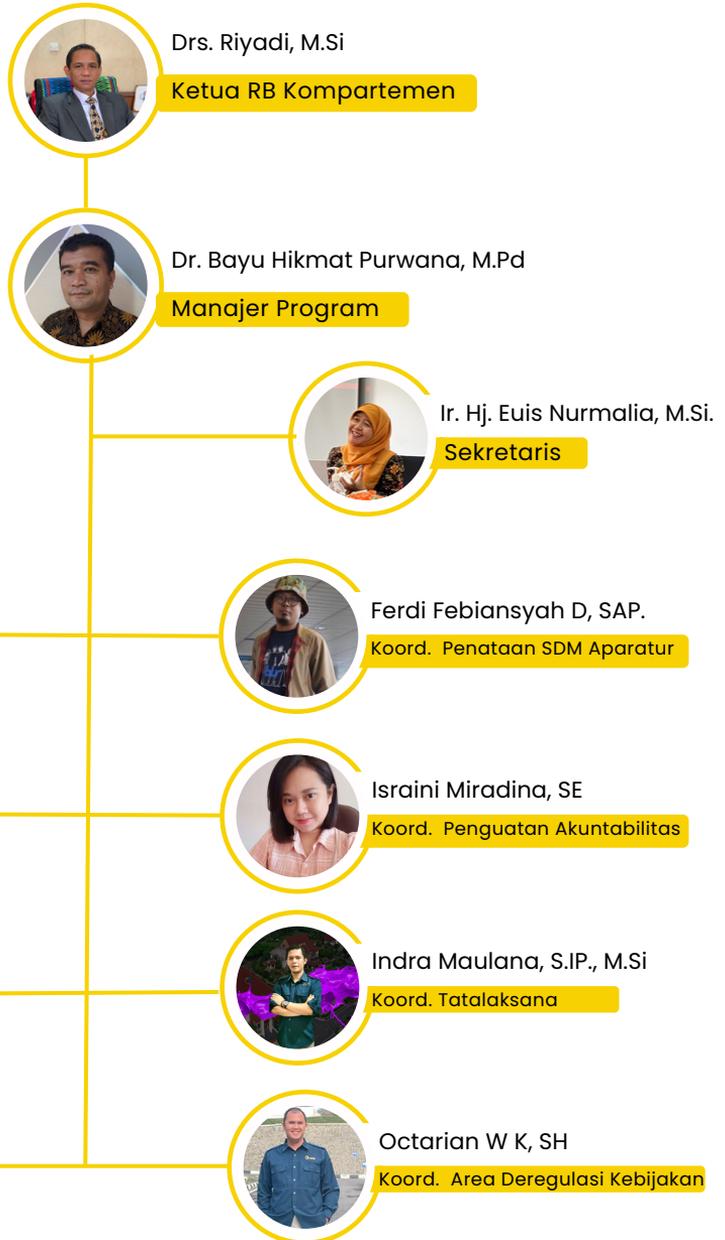
Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Puslatbang PKASN Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan RB di lingkungan Puslatbang PKASN.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan RB Puslatbang PKASN tahun 2022.

C. SUSUNAN TIM RB KOMPARTEMEN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Nomor 96/PLB.1.1/HKM.02.2 tentang Tim Reformasi Birokrasi Puslatbang PKASN LAN. Berikut susunan Tim RB Puslatbang PKASN :

Struktur Tim RB Puslatbang PKASN



BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM RB

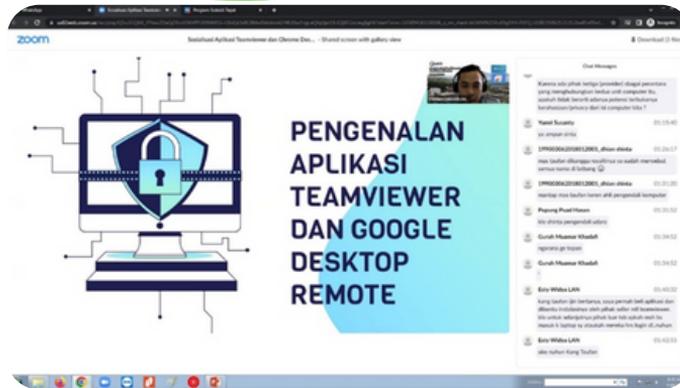
A. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui Penggunaan Perangkat Lunak Komputer Kendali Jarak Jauh

Sejak pandemi covid-19 pada tahun 2020, LAN memberlakukan sistem kerja Flexible Working Arrangement (FWA), dimana pegawai bisa bekerja dari mana saja terutama yang bekerja dari rumah untuk mencegah penularan covid-19. Dengan penerapan FWA ini, banyak pegawai yang kesulitan mengakses data yang ada di computer/server kantor sehingga dibutuhkan suatu perangkat lunak yang dapat menghubungkan antara komputer/server kantor dengan laptop yang dipakai pegawai untuk FWA. Pada tahun 2022, Work from Office mulai diberlakukan kembali secara bertahap di lingkungan LAN. Namun, situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir tetap menuntut konektivitas antara komputer/server kantor dengan laptop pribadi yang bisa digunakan untuk bekerja dimana saja sehingga penggunaan perangkat lunak pengendali komputer jarak jauh masih dibutuhkan oleh pegawai.

Rencana aksi peningkatan kinerja pegawai melalui penggunaan perangkat lunak computer kendali jarak jauh merupakan salah satu rencana aksi Area Manajemen Perubahan. Rencana aksi ini bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran RB yaitu birokrasi yang kapabel. Adapun output yang dihasilkan dari rencana aksi ini yaitu :

1. Kegiatan sosialisasi penggunaan perangkat lunak Google Remote Desktop dan Team Viewer
2. Panduan penggunaan perangkat lunak Google Remote Desktop dan Team Viewer
3. Laporan kegiatan dan evaluasi kemanfaatan perangkat lunak Google Remote Desktop dan Team Viewer

Manfaat yang dihasilkan dari rencana aksi ini adalah dengan adanya sosialisasi dan panduan perangkat lunak Google Remote Desktop dan Team Viewer pegawai dapat lebih mudah untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja karena dapat terhubung dengan komputer/server di kantor selama terdapat koneksi internet. Selain itu penggunaan aplikasi ini dapat mendukung rencana program kerja kedepannya di Puslatbang PKASN dimana pegawai dapat bekerja pada co-working space yang akan disediakan di beberapa tempat di lingkungan Puslatbang PKASN sehingga pegawai tidak jenuh bekerja di ruangan saja dan dapat mencari suasana kerja baru dengan tetap terhubung dengan komputer/server yang ada di ruangnya.

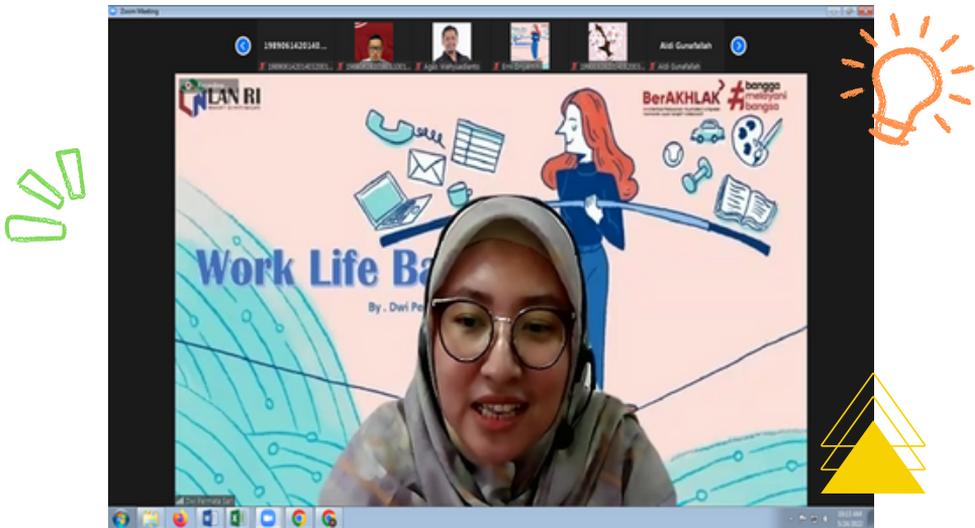


Gambar 1. Sosialisasi Penggunaan Perangkat Lunak Pengendali Komputer Jarak Jauh

B. Pelatihan dan Penerapan Work Life Balance untuk Pegawai

Work-life Balance ini merupakan salah satu Program atau kegiatan yang ada di Area Manajemen Perubahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari pelaksanaan Roadmap RB LAN Tahun 2020-2024 yaitu Birokrasi yang kapabel. Cara-cara baru yang dilakukan untuk mencapai kinerja instansi lebih baik bukan hanya dengan bekerja setiap waktu, namun juga perlu dilakukan kegiatan yang sekiranya dapat menyeimbangkan antara hobi dan pekerjaan bisa berjalan selaras sehingga terciptanya keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani disetiap pegawai di lingkungan Puslatbang PKASN.

Sharing Session mengenai Work Life Balance juga diadakan dengan narasumber Mba Dwi Permatasari, S.Psi., M.Psi. Sebagai seorang psikolog klinis yang juga menjabat sebagai Asesor SDM Aparatur, beliau membagikan ilmu mengenai pentingnya mengatur keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Dimana kehidupan pribadi seseorang dapat berdampak pada urusan pekerjaannya yang dapat berdampak pada pencapaian kinerja organisasi. Diharapkan dengan sharing session ini pegawai dapat mengatur keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya sehingga kehidupan pribadi bahagia, pekerjaan dapat dikerjakan secara optimal dan kinerja organisasi dapat meningkat.



Gambar 2. Sharing Session Implementasi Work Life Balance

Untuk menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan rohani, Puslatbang PKASN juga mengadakan olahraga bersama yang rutin digelar, biasanya dilaksanakan berupa senam Bersama atau kegiatan olahraga masing masing pegawai yang disesuaikan dengan minatnya seperti Zumba, jalan santai, fitness atau sepeda. Selain itu di bidang kerohanian juga diadakan kegiatan keagamaan seperti pada Bulan Ramadhan ada kegiatan mengenai bedah buku tentang Islam dan Tausyiah.

Adapun manfaat yang dihasilkan dari rencana aksi ini yaitu pegawai dapat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kehidupan pribadi yang baik dapat meningkatkan produktivitas pegawai. Meningkatnya produktivitas pegawai berpengaruh pada peningkatan kinerja lembaga.

C. Penataan Dokumen, Sosialisasi dan Konsultasi Produk Hukum

Deregulasi adalah proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara yang dianggap menghambat kinerja pemerintah. Deregulasi Kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan langkah review, evaluasi dan publikasi terhadap produk hukum yang telah dihasilkan. Kegiatan ini merupakan program/kegiatan dari Area Deregulasi Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran RB yaitu Birokrasi yang kapabel.

Output yang dihasilkan dari rencana aksi ini yaitu data hasil identifikasi produk hukum dan e-bankum (Bank Data Produk Hukum), selain itu peraturan yang telah diidentifikasi ditampilkan dalam website Puslatbang PKASN. Adapun peraturan yang diidentifikasi pada tahun 2022 dan ditampilkan di website Puslatbang PKASN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi di Lingkungan LAN.



Gambar 3. Penayangan Hasil Identifikasi Peraturan di website puslatbang PKASN



Gambar 4. Infografis Produk Hukum

Selain menayangkan produk hukum yang telah diidentifikasi, juga dibuat infografis dari produk hukum. Pembuatan infografis ini bertujuan agar dapat mempermudah dalam pemahaman produk hukum. Infografis ini juga ditayangkan dalam website Puslatbang PKASN.



Gambar 5. Sosialisasi dan diskusi produk hukum

Konsultasi untuk produk hukum juga dilaksanakan sebagai layanan dari Area Deregulasi Kebijakan, pegawai atau unit kerja yang akan berkonsultasi mengenai produk hukum atau yang akan membuat produk hukum dapat mengisi form konsultasi produk hukum. Dari hasil konsultasi dan identifikasi produk hukum dapat dihasilkan produk hukum pada tahun 2022 sebagai berikut :

Surat Keputusan Bagian Umum	48
Surat Keputusan Latbang	43
Surat Keputusan BLPK	23
Surat Keputusan Kajian	8
Peraturan Kepala	1
Surat Keputusan Kepala	19
MoU dan Perjanjian Kerja Sama	14

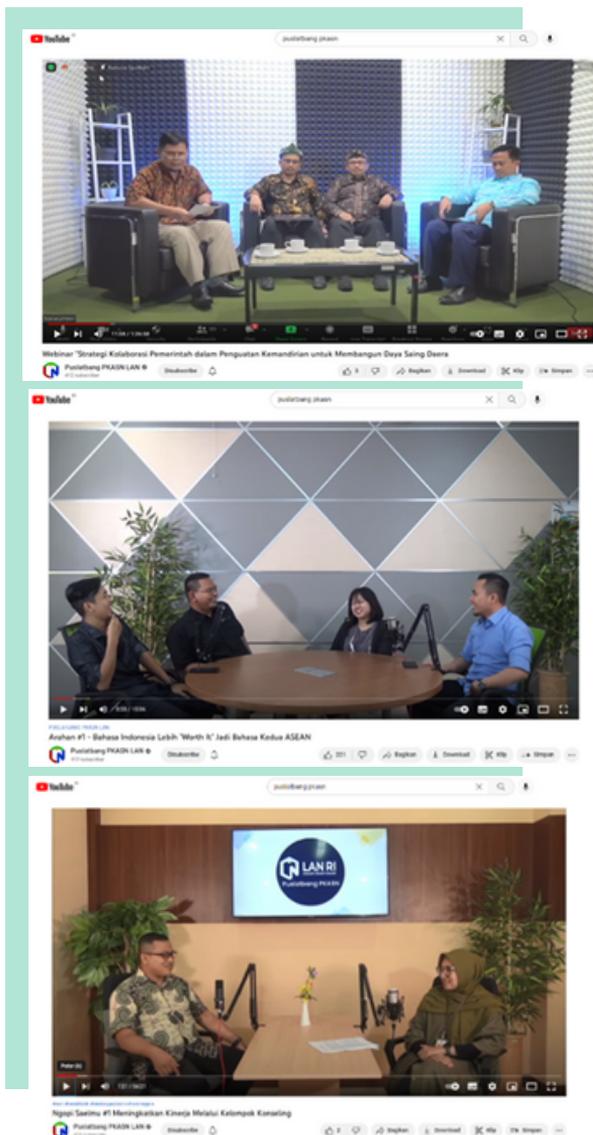
PETA KETERKAITAN KEBIJAKAN
PUSLATBANG PRASN LAN TAHUN 2021-2022

NO	PERATURAN	KUJUKAN PERATURAN DI ATASNYA
TAHUN 2021		
1.	Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Pematangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Nomor 9/PLB.1.1/HKM.02.2 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Puslatbang PRASN LAN	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 292/K.1/HKM.02.2/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara;
2.	Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Pematangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Nomor 17/PLB.1.1/HKM.02.2 tentang Tim Penjamin Mutu Penyelenggaraan Pelatihan (TPMPPT) di Puslatbang PRASN LAN	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaga Administrasi Negara (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494); Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

Gambar 6. Form konsultasi produk hukum dan peta keterkaitan kebijakan

Adapun manfaat dari renaksi penataan, sosialisasi dan konsultasi produk hukum ini yaitu untuk mengkaji peraturan yang ada apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan di atasnya atau apakah peraturan tersebut dapat menghambat pelayanan terhadap stakeholders. Selain itu dengan adanya sosialisasi mengenai produk hukum, pegawai dapat lebih memahami tentang peraturan yang berlaku.

D. Memperkuat Institusional Branding Melalui Pengembangan Media Sosial di Lingkungan Puslatbang PKASN



Gambar 7. Chanel Youtube Puslatbang PKASN

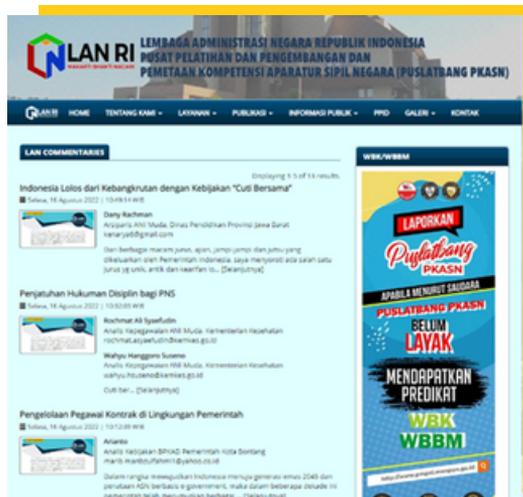
Pada era digital saat ini diperlukan kemampuan manajemen dalam mengelola dan membangun citra lembaga salah satunya dengan menggunakan media sosial. Keunggulan platform media sosial adalah kemampuan untuk menyebarkan konten agar menjadi perhatian atau perbincangan secara massif. Dalam upaya penataan organisasi, Tim Area Penataan Organisasi melakukan optimalisasi media social sebagai sarana Institusional Branding.

Output yang dicapai dari program ini adalah terpublikasikannya kegiatan yang ada di Puslatbang PKASN pada berbagai media seperti media social, Website atau media massa secara menarik sehingga meningkatkan nilai Branding Puslatbang PKASN. Adapun sasaran RB yang dicapai yaitu terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel.

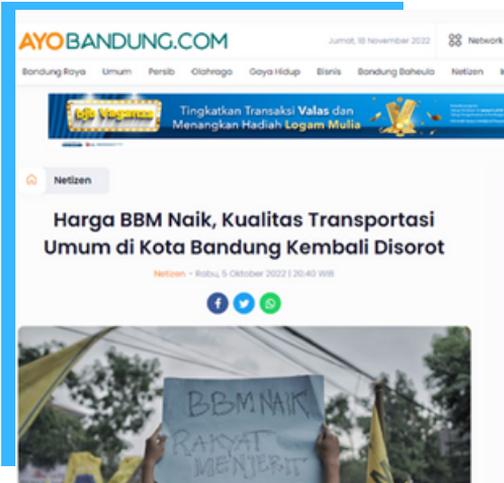
Adapun manfaat dari rencana aksi ini adalah Puslatbang PKASN semakin dikenal baik dari sisi sebagai lembaga pelatihan, penyelenggaraan kompetensi atau fungsi pengkajiannya.

E. LAN Commentaries

LAN Commentaries adalah platform di mana para analis kebijakan, widyaiswara, peneliti, akademisi, fungsional tertentu, dan ASN lainnya untuk dapat mempresentasikan analisis berkala mereka tentang berbagai isu strategis yang menarik, mulai dari ekonomi, politik/pemerintahan dalam negeri, administrasi negara, manajemen ASN hingga urusan regional. Analisis yang disajikan dalam LAN Commentaries mewakili pandangan penulis dan bukan lembaga yang berafiliasi dengan mereka, ataupun Puslatbang PKASN LAN RI. Dalam rangka kegiatan RB Kompartemen Puslatbang PKASN, seluruh pegawai baik internal Puslatbang PKASN, ataupun dari instansi luar dapat mengirimkan artikel ataupun opini populernya yang nantinya akan dipublikasikan di website Puslatbang PKASN dan Media Online bagi pemenang tulisan.

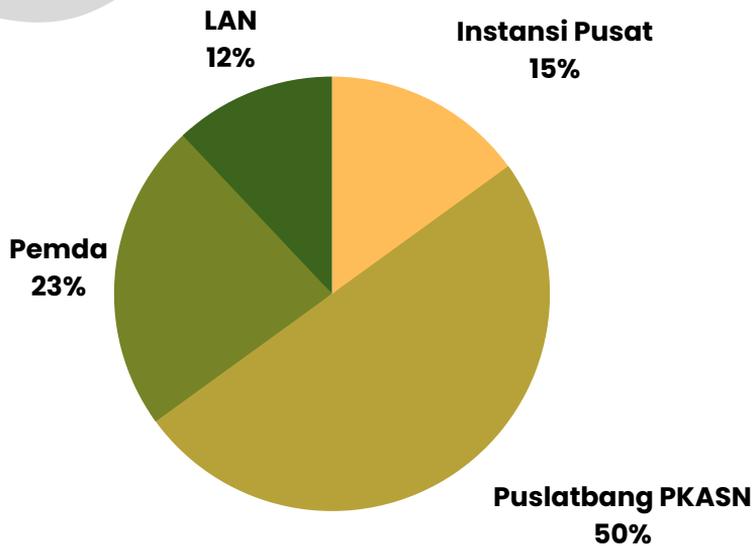


Gambar 8. LAN Commentaries pada website Puslatbang PKASN



Gambar 9. Artikel LAN Commentaries di salah satu media online

Selama Tahun 2022 telah terbit 38 artikel, dengan rincian 20 artikel terbit di platform LAN Commentaries, 18 artikel terbit di media online Ayobandung.com. Adapun penulis yang mengirimkan artikel ke LAN Commentaries berasal dari ASN di lingkungan Puslatbang PKASN, ASN di lingkungan LAN, ASN dari Instansi lainnya dan dari kalangan mahasiswa.



Komposisi Penulis LAN Commentaries

Artikel yang diterbitkan oleh LAN Commentaries juga mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, beberapa artikel LAN Commentaries yang diterbitkan di media online Ayobandung.com memperoleh penghargaan sebagai artikel terfavorit pilihan netizen pada bulan Juni dan Oktober. Selain itu, artikel LAN Commentaries yang berjudul Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa, PR Besar Pemerintah yang Harus Diselesaikan dijadikan konten youtube oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).



Gambar 10. Artikel LAN Commentaries yang mendapatkan penghargaan

Untuk menarik minat menulis pada platform LAN Commentaries dan juga sebagai salah satu cara branding instansi, setiap artikel yang diterbitkan di LAN Commentaries dibuat infografisnya.



Gambar 11. Infografis Artikel LAN Commentaries

Rencana aksi LAN Commentaries ini berkaitan dengan area penataan organisasi dan juga terkait dengan sasaran RB yaitu Birokrasi yang kapabel. Adapun manfaat yang dapat dirasakan melalui LAN Commentaries ini adalah tersedianya wadah untuk menulis sehingga penulis baik ASN amupun Non ASN dapat mengemukakan opininya, selain itu dengan adanya LAN Commentaries dapat membangun minat dan bakat menulis bagi ASN Puslatbang PKASN khususnya dan semua kalangan pada umumnya. LAN Commentaries ini juga bisa menjadi salah satu media branding Puslatbang PKASN agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

F. PELANGI (PELAYANan Arsip Digital) di Central File Puslatbang PKASN

Pelaksanaan penguatan pengelolaan program arsip merupakan program unggulan dari area penataan tatalaksana. Arsip merupakan hal yang penting bagi suatu instansi karena dalam arsip terekam berbagai macam informasi dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut. Kegiatan penguatan pengelolaan arsip ini terkait dengan area penataan tatalaksana dan juga pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang kapabel.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Selain itu juga, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Selain itu juga pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

Untuk mempermudah pelayanan kearsipan dibuat aplikasi sederhana yang dinamakan PELANGI (PELAYaNan Arsip DiGItal) yang menjadi output dari rencana aksi ini. Adapun manfaat yang dihasilkan dari rencana aksi ini yaitu pelaksanaan pelayanan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien.

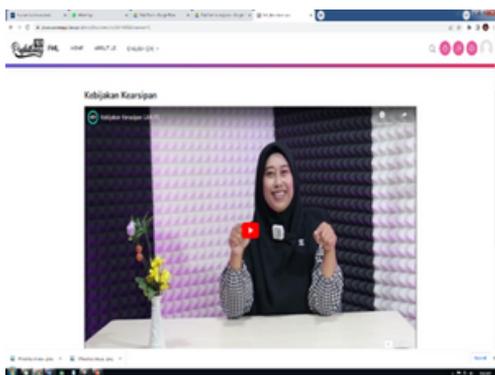
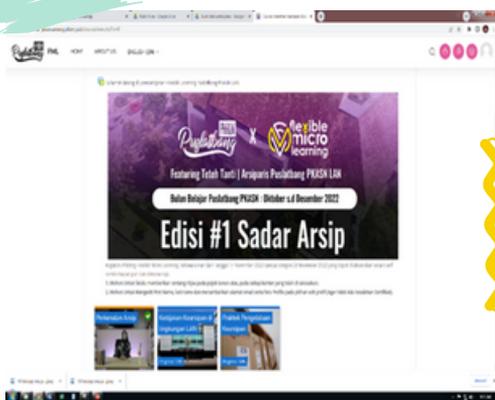


Gambar 12. Aplikasi PELANGI dan layanan Arsip Digital

G. Pembangunan Flexible Micro Learning dalam Konteks Penguatan Penataan Manajemen SDM

Penataan Sistem Manajemen Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan ini, area Penataan Manajemen SDM membuat program pembangunan Flexible Micro Learning dalam program ini yaitu tersedianya Web Micro Learning. Adapun sasaran RB yang dicapai melalui program ini adalah terciptanya birokrasi yang kapabel.

Flexible Micro Learning merupakan strategi pembelajaran secara daring yang menggabungkan flexible learning dan micro learning ke dalam suatu wadah atau platform learning management system (LMS), dimana Flexible Micro Learning lebih berfokus pada strategy delivery konten pembelajaran yang dibuat secara flexible, dapat diakses kapanpun dan dimana pun. Sedangkan micro learning merupakan strategi dalam pengembangan konten pembelajaran, dimana learning materials dibuat dalam paket-paket kecil, sesuai dengan target indikator pembelajaran yang telah ditentukan, dan dikemas dengan memenuhi 3 (tiga) kriteria micro learning yaitu singkat, interaktif dan pragmatic. FML dijalankan dalam sebuah wadah/Platform LMS yang telah disesuaikan agar dapat memberikan self service bagi peserta.



Gambar 13. Flexible Micro Learning

Target kompetensi pegawai yang ingin dicapai melalui program FML ini adalah hard skill yang berada di tingkat Lower Order Thinking Skill, sehingga pegawai yang mengikuti kegiatan FML dituntut untuk mencapai level kognitif reading, understanding dan applying. Hal tersebut sangat cocok untuk mendistribusikan keterampilan teknis, operasional, penggunaan alat bantu (hardware/software) yang menunjang pekerjaan dan lain-lain. Perancangan konten FML ini dibuat secara detail mulai dari rancangan kurikulum, RBMPM dan RB (Rencana Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan dan Rencana Pembelajaran) melalui pendekatan micro learning yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tujuan pembelajaran dimana setiap urusan kegiatan akan nada kuis yang bertujuan untuk pengendalian atau feedback. Aplikasi ini diharapkan dapat semakin mempermudah pegawai untuk memenuhi hak pengembangan kompetensinya sebesar 20 JP.

Ide aplikasi Flexible Micro Learning ini telah digagas sejak tahun 2021, namun mendapatkan kendala. Pada tahun 2022 aplikasi ini dibangun kembali dengan salah satu konten pelatihannya yaitu mengenai kearsipan. Manfaat dari FML ini yaitu sebagai sarana pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Puslatbang PKASN pada khususnya dan ASN secara keseluruhan pada umumnya.

H. Peningkatan disiplin dan komitmen ASN Berakhlak di lingkungan Puslatbang PKASN melalui Program Pegawai Teladan

Pegawai teladan di Puslatbang PKASN ini bertujuan Memberikan apresiasi kepada pegawai yang berkinerja terbaik berupa penghargaan sebagai pegawai teladan, diberikan per semester. Indikator penilaian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu melalui survey dan kehadiran pegawai. Pimpinan Unit memilih 3 (tiga) kandidat yang layak dijadikan pegawai teladan dan pegawai memilih satu orang kandidat pegawai teladan.

Penilaian yang diberikan oleh pimpinan terhadap nominator. Penilaian sifatnya memilih langsung kandidat pegawai dengan pertimbangan daftar kehadiran. Indikator melalui kehadiran merupakan hasil pengerucutan berdasarkan rekap kehadiran dan flexy time selama 6 bulan.

Reward bagi pegawai teladan berupa sertifikat yang ditandatangani Kepala Puslatbang PKASN, Pegawai teladan yang terpilih diberikan prioritas pengembangan pegawai, salah satunya berupa pengiriman diklat ataupun seminar.

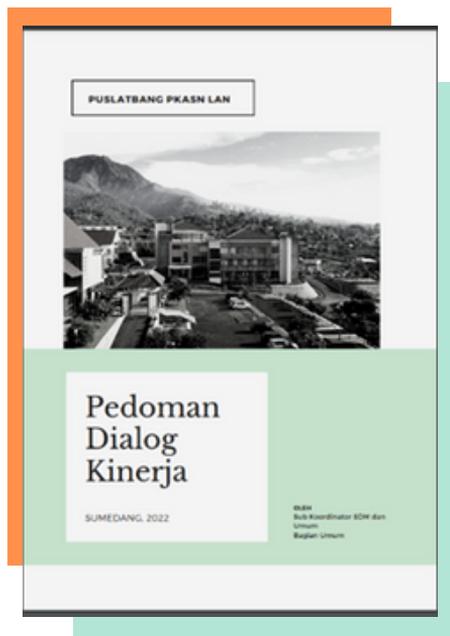


Gambar 14. Penghargaan Pegawai Teladan Semester I

Rencana aksi ini terkait dengan area pelayanan SDM, selain itu juga terkait dengan sasaran RB yaitu Birokrasi yang kapabel. Output yang dihasilkan dari rencana aksi ini adalah telaksananya Penghargaan Pegawai Teladan. Adapun manfaat dari rencana aksi ini yaitu sebagai sarana apresiasi terhadap pegawai yang memiliki kinerja terbaik. Selain itu apresiasi ini juga sebagai penyemangat bagi pegawai lainnya agar terus berusaha mencapai kinerja terbaik.

I. Penguatan peran dialog kinerja atasan - bawahan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai

Memasuki tahun 2021, program pengembangan kompetensi di lingkungan Puslatbang PKASN dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu :



Gambar 15. Pedoman Dialog Kinerja

1. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
- 2.. Matrikulasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan kategori
3. Identifikasi potensi knowledge share (fasilitator)
4. Penyusunan Matriks kebutuhan Bangkom dengan potensi fasilitator dan pola penganggaran bangkom
5. Pelaksanaan bangkom
6. Evaluasi bangkom

Merujuk kepada PerLAN 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pembelajaran berbasis pengalaman dalam rangka akselerasi transfer pengetahuan praktis, dapat dijabarkan dalam bentuk, yakni

1. Coaching
2. Mentoring
3. Detasering (secondment)
4. Pertukaran PNS
5. Bimbingan di tempat kerja
6. Magang

Dialog kinerja dalam konteks kegiatan ini diartikan sebagai proses pendampingan dan berbagi pengalaman dalam kerangka mentoring guna identifikasi dan pengembangan potensi pegawai serta pemantauan terhadap sasaran kinerja pegawai yang telah disepakati guna mempercepat kemajuan dan perkembangan dalam penyelesaian pekerjaan dan pengembangan karier pegawai.

Rencana aksi ini berkaitan dengan area penataan manajemen SDM dan terkait dengan sasaran RB yaitu Birokrasi yang Kapabel. Output yang dihasilkan yaitu disusunnya Pedoman Dialog Kinerja. Adapun manfaat dari rencana aksi ini yaitu dengan adanya dialog kinerja ini dapat menjadi salah satu hal yang dapat menunjang pencapaian kompetensi jabatan bagi masing-masing pegawai di Puslatbang PKASN.

J. Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Puslatbang PKASN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan Pemerintah salah satu tujuannya adalah Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan profesionalisme ASN merupakan bagian dari upaya pengembangan karir ASN dalam Jabatan yang dimiliki, baik berupa penataan, pembinaan dalam jabatan fungsional tersebut serta peningkatan kompetensinya.

Adapun upaya pembinaan karir perlu dilakukan secara kontinyu dan optimal. Optimalisasi pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada semua jabatan baik melalui Jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Selain itu salah satu upaya pembinaan karir PNS dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN yaitu dengan cara pengusulan Jabatan Fungsional, pemantauan angka kredit Jabatan Fungsional dan kenaikan pangkat Jabatan fungsional.

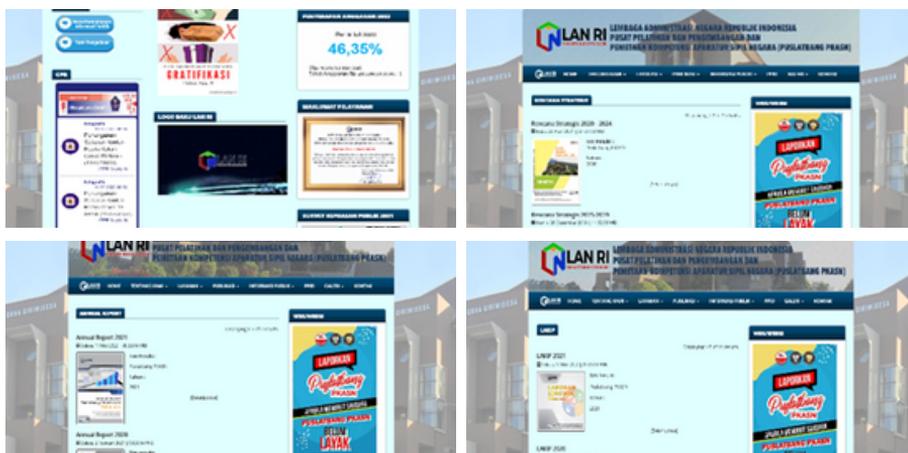


Gambar 16. Pemantauan Angka Kredit Jabatan Fungsional

Rencana aksi ini berkaitan dengan area penataan manajemen SDM dan terkait dengan sasaran RB yaitu Birokrasi yang kapabel. Output yang dihasilkan dari rencana aksi ini yaitu terbentuknya Forum Komunikasi Jabatan Fungsional. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari rencana aksi ini yaitu terpantaunya angka kredit Jabatan Fungsional sehingga para JF dapat memperkirakan apa saja yang harus dikerjakan untuk memenuhi target angka kreditnya. Pembinaan JF ini juga dapat meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional

K. Sosialisasi Dokumen SAKIP Puslatbang PKASN 2020 – 2024

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka dibuat rencana aksi Sosialisasi Dokumen SAKIP Puslatbang PKASN 2020 – 2024. Adapun output yang dihasilkan dari program ini yaitu publikasi pencapaian anggaran, Renstra, Annual Report dan LAKIP pada website Puslatbang PKASN. Rencana aksi ini berkaitan dengan area penguatan akuntabilitas dan terkait dengan salah satu sasaran RB yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Manfaat dari sosialisasi ini yaitu agar stakeholder maupun pegawai dapat mengetahui tentang pencapaian kinerja Puslatbang PKASN.



Gambar 17. Publikasi Pencapaian Anggaran, Renstra, Annual Report dan LAKIP pada website Puslatbang PKASN

L. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Melalui Berbagai Media Dan Monitoring Dan Evaluasi Anggaran, Kegiatan Dan Kinerja Secara Berkala

Dalam pelaksanaan anggaran, Puslatbang PKASN selaku instansi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran sebagai langkah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Untuk memonitoring dan evaluasi anggaran ini digunakan berbagai media yaitu dengan rapat koordinasi setiap triwulan, penggunaan aplikasi e-Monev, SMART dan SAKTI untuk pemantauan kinerja setiap bulannya.

Rencana aksi ini berkaitan dengan area penguatan akuntabilitas dan terkait dengan salah satu sasaran RB yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Adapun output yang dihasilkan yaitu :

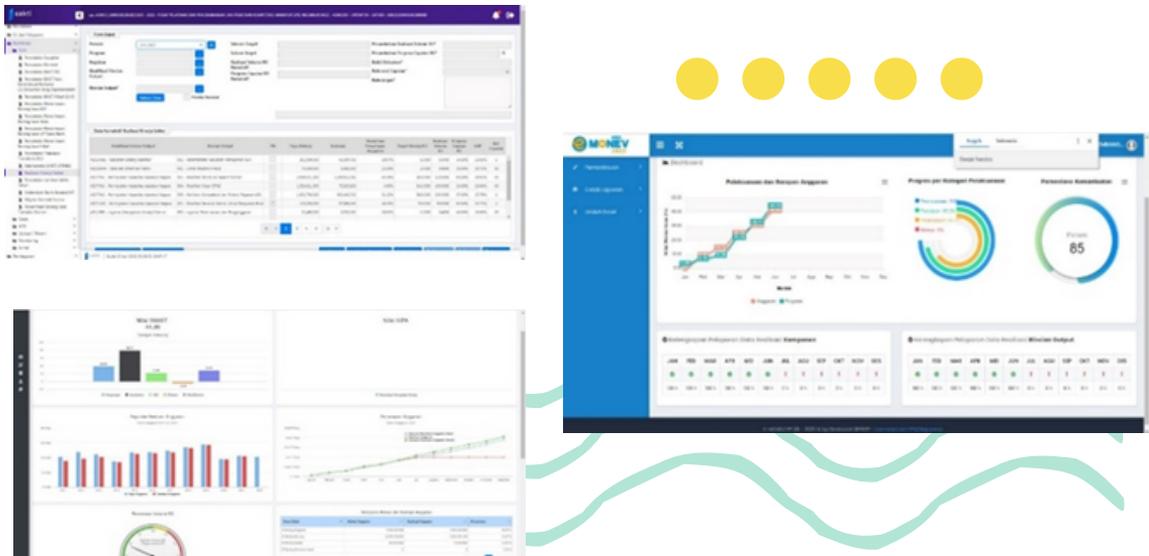
Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan anggaran setiap bulan

Laporan kegiatan dan anggaran triwulan dalam forum rapat monitoring dan evaluasi

Laporan kinerja terkait capaian IKU pada masing-masing individu pegawai persemester

Laporan dwimingguan dari unit kerja/poksi

Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan dari rencana aksi ini yaitu kinerja dapat dipantau secara optimal sehingga dapat terlihat apakah ada hambatan, jika ada hambatan bisa ditangani dengan lebih cepat sehingga tidak menghambat



Gambar 18. Pengisian e-Monev, SMART dan SAKTI

M. Peningkatan Kapasitas Pengelola Akuntabilitas Kinerja

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan Good Governance tersebut, salah satunya diperlukan kompetensi SDM yang memadai.

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan Good Governance tersebut, salah satunya diperlukan kompetensi SDM yang memadai.



Gambar 19. Sosialisasi dan Review pembahasan SAKIP 2021/2022

Untuk meningkatkan kompetensi pengelola akuntabilitas khususnya ASN yang bekerja di sub bagian perencanaan dan keuangan, pada tanggal 8 November 2022 dilaksanakan Review Pembahasan SAKIP dengan narasumber Muhammad Azka Nurul Fajri, S.IP dari Inspektorat LAN. Pada acara tersebut dijelaskan tentang poin apa saja yang dinilai dalam SAKIP serta membahas tentang penilaian SAKIP Puslatbang PKASN dana pa saja yang harus ditingkatkan dalam penyusunan SAKIP Puslatbang PKASN kedepannya.

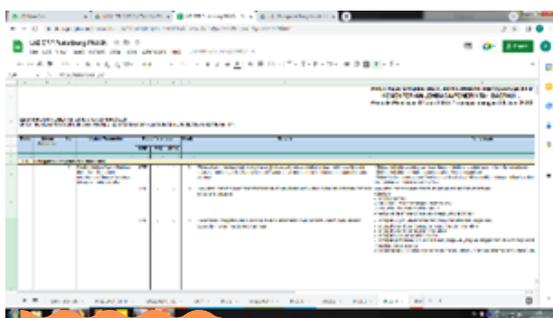
Output yang dihasilkan pada renaksi ini yaitu terlaksananya bimtek/workshop terkait peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja. Adapun manfaat yang diperoleh dari renaksi ini adalah meningkatnya kompetensi pegawai pengelola akuntabilitas kinerja dan meningkatnya kualitas laporan akuntabilitas kinerja

N. Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah) pada pelaksanaan program dan kegiatan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengimplementasikan SPIP ini maka dibuat 4 (empat) program yaitu:

1. Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai



Gambar 20. Bimtek dan Pengisian LKE Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Penyusunan Profil Risiko Puslatbang PKASN

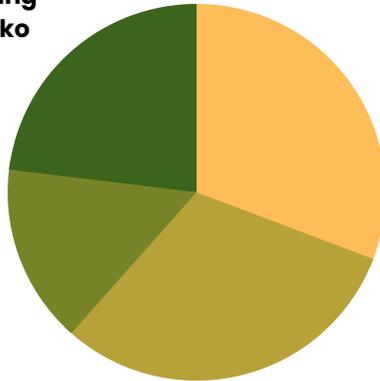
Kegiatan Manajemen Risiko diawali dengan mengidentifikasi jenis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan unit kerja. Dari dokumen identifikasi dokumen Manajemen Risiko tahun 2022 dapat diidentifikasi risiko sebanyak 13 risiko.

**Latbang
3 risiko**

**Bagian Umum
4 risiko**

**BLPK
2 risiko**

**Kajian
4 risiko**



B. PETA RISIKO

PETA RISIKO 5x5	SEVIL DAMPAK				
	1 Tidak Signifikan	2 Kurang Signifikan	3 Sedang	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
5 Sangat Tinggi	5	10	15	20	25
4 Tinggi	4	8	12	16	20
3 Cukup Tinggi	3	6	9	12	15
2 Rendah	2	4	6	8	10
1 Sangat Rendah	1	2	3	4	5

Gambar 21. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

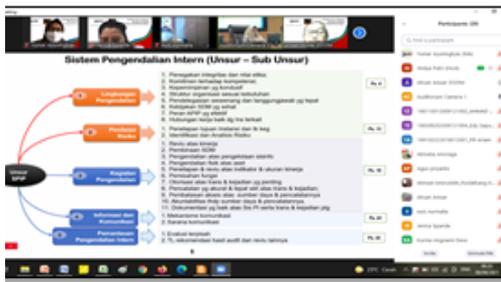
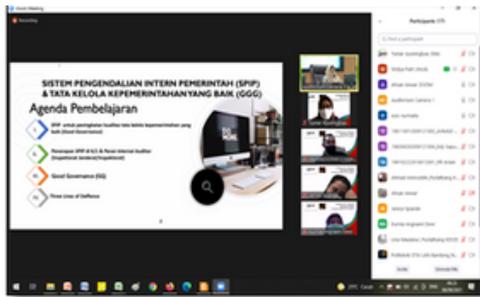
3. Monitoring dan Evaluasi implementasi SPIP pada pelaksanaan program dan kegiatan

Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP dilaksanakan secara berkala, baik dengan inspektorat maupun di lingkungan internal Puslatbang PKASN.



Gambar 22. Rapat Pembahasan dan Monev Manajemen Risiko

4. Peningkatan Kompetensi Pengelola Manajemen Risiko



Gambar 23. Peningkatan Kompetensi Pegawai Melalui Bimtek Manajemen Risiko

Rencana aksi implementasi manajemen risiko ini terkait dengan area penguatan pengawsan dan sasaran RB yaitu Birokrasi yang Kapabel. Output yang dihasilkan yaitu Laporan Manajemen Risiko Puslatbang PKASN. Manfaat yang dapat dihasilkan dari rencana aksi implementasi manajemen risiko ini adalah organisasi dapat mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat kinerja sehingga risiko tersebut bisa diatasi dengan lebih cepat dan tepat.

O. Pembangunan LAN yang bersih dan bebas KKN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pada tahun 2021, Puslatbang PKASN mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Dengan didapatkannya predikat tersebut, bukan berarti puas begitu saja namun Puslatbang PKASN berkomitmen agar lebih baik lagi untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Untuk mewujudkan LAN yang bersih dan bebas KKN serta pembangunan ZI menuju dilaksanakan program program sebagai berikut :

1. Pemantauan pengendalian gratifikasi

Untuk pemantauan pengendalian gratifikasi disusun Laporan Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengelola Gratifikasi per triwulan.

2. Pemantauan penyampaian LHKPN dan LHKASN

Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Puslatbang PKASN sebesar 100%

The image shows two official forms from the Indonesian government. The left form is a receipt (TANGKA TERIMA) for a State Asset Report (LHKPN) submitted to the KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). The right form is a report card (BUKTI PELAPORAN) for the State Asset Report (LHKASN) submitted to Puslatbang PKASN.

KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA	
J. Kuningan Perintis Kiri, 4, Setiabudi Jakarta 12920	
TANGKA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
Atas Nama	: DIANI OKTAFIANI
NIK	: 3204054310860006
Lembaga	: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
Unit Kerja	: PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN
Sub Unit Kerja	: PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN
Jabatan	: BENDAHARA PENERIMAAN
Jenis Laporan	: Khusus - Areal Mengjabat
Tanggal Kirim	: 8 Februari 2022

QR Code: [QR Code]

010119 - 051019002

BUKTI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA	
DATA PRIBADI	
Nama	: SANTOSA
NIP	: 1982082020119021001
Golongan/Pangkat	: ISB - Penata Muda Tk. 1
Jabatan	: Pengelola BSN
Eselon	: STAF FUNGSIONAL UMUM
Unit Kerja	: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Instansi	: Lembaga Administrasi Negara
INFORMASI LAPORAN	
Nomor Pelaporan	: 051019002
Tanggal Laporan	: 18 Februari 2022
NPWP	: 59.246.515.7-401.000
Status Pelaporan	: Tahap-Input - Verifikasi - Telah Diverifikasi
Pelaporan harta kekayaan telah dilaporkan melalui online pada situs siharka.menpan.go.id.	
Barcode: [Barcode]	
051019002	
010119 - 051019002	14 Maret 2022

Gambar 24. Penyampaian LHKPN dan LHKASN

3. Sosialisasi tentang Gratifikasi, WBS (Whistle Blowing System) dan WBK (Wilayah Bebas Korupsi)



Gambar 25. Pembacaan Pakta Integritas oleh Peserta Kegiatan

Sosialisasi mengenai gratifikasi, WBS dan WBK dilakukan secara intensif di berbagai media baik itu di social media Puslatbang PKASN, pertemuan pegawai, banner, dan pada saat overview atau pembukaan kegiatan yang melibatkan stakeholder.



Gambar 26. Sosialisasi Gratifikasi

4. Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan gratifikasi

Untuk meningkatkan pemahaman gratifikasi pegawai dikirimkan beberapa orang pegawai untuk mengikuti e-learning pemahaman gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK



Gambar 27. Pelatihan Gratifikasi bagi pegawai

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI di Puslatbang PKASN

Saat ini Puslatbang PKASN menjadi salah satu satker/kompartemen di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM dan telah dievaluasi oleh tim evaluator KemenPAN RB pada tanggal 12 September 2022



Gambar 28. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (WBBM) oleh Kemenpan RB

6. Sharing knowledge dan/atau sharing experience terkait dengan WBK kepada Politeknik STIA LAN Bandung

Puslatbang PKASN sebagai satker/kompartemen yang telah meraih predikat WBK, mendukung Politeknik STIA LAN untuk dapat meraih predikat WBK. Dukungan ini tidak hanya untuk lingkungan satker LAN saja namun terbuka bagi instansi lain yang ingin sharing knowledge untuk memperoleh predikat WBK.

Pembangunan LAN yang bersih dan bebas KKN ini merupakan rencana aksi yang berkaitan dengan area penguatan pengawasan dan sasaran RB yang terkait dengan rencana aksi ini yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari rencana aksi ini yaitu menjadikan Puslatbang PKASN khususnya dan LAN pada umumnya sebagai instansi pemerintah yang terpercaya dan bersih dari KKN.



Gambar 29. Pendampingan pembangunan Zona Integritas kepada Politeknik STIA LAN

P. Penyempurnaan dan implementasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan di setiap unit kerja pelayanan

Maklumat pelayanan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan, Puslatbang PKASN juga memiliki maklumat pelayanan. Melalui maklumat pelayanan ini, Puslatbang PKASN berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada stake holder sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.



Gambar 30. Maklumat Pelayanan

Sedangkan standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Pada tahun 2022, Puslatbang PKASN telah melakukan review atas standar pelayanan yang ditetapkan sebelumnya. Standar Pelayanan yang berlaku saat ini adalah standar pelayanan yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Puslatbang PKASN Nomor 140/PLB.1.1/HKM.02.2 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Puslatbang PKASN.



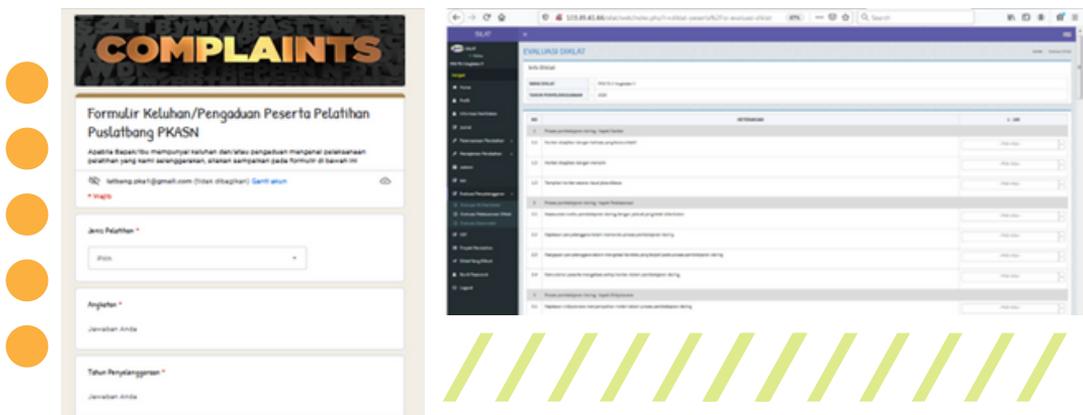
Gambar 31. Standar Pelayanan

Rencana aksi ini berkaitan dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik dan terkait dengan sasaran RB yaitu Pelayanan Publik yang Prima. Output yang dihasilkan yaitu setiap unit telah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Sedangkan manfaat dari rencana aksi ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan Puslatbang PKASN kepada stakeholder.

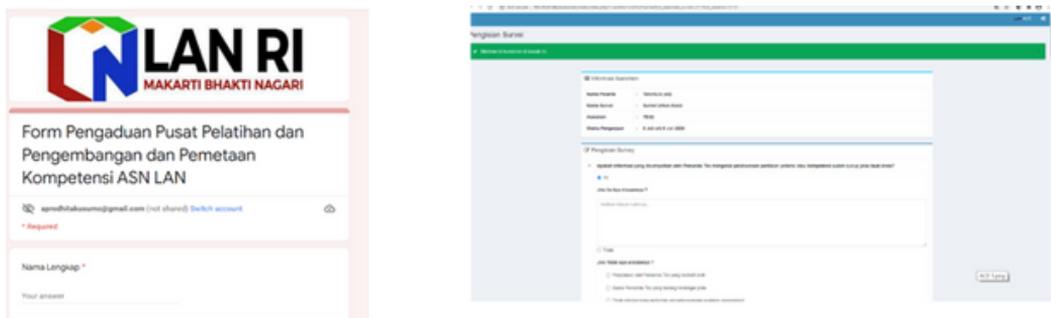
Q. Pengelolaan Konsultasi dan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholder, penanganan pengaduan adalah salah satu hal yang diutamakan. Untuk menangani pengaduan ini Puslatbang PKASN menyediakan berbagai macam media baik secara online maupun pengaduan langsung

Rencana aksi ini terkait dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik dan terkait dengan sasaran RB yaitu Pelayanan Publik yang Prima. Adapun output yang dihasilkan yaitu terciptanya tata kelola pelayanan publik yang prima di lingkungan Puslatbang PKASN. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan dilaksanakannya rencana aksi ini yaitu terwujudnya pelayanan publik yang prima dan meningkatnya kepuasan stakeholder.



Gambar 32. Menu Pengaduan Pada Aplikasi SILAT



Gambar 33. Menu Pengaduan Pada Aplikasi e-Assessment



Gambar 34. Menu Pengaduan Pada Website Utama



Gambar 35. Kotak Pengaduan

R. Survey Kepuasan Terhadap Kualitas Layanan Puslatbang PKASN

Survei kepuasan pelayanan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat stakeholder dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan. Survei kepuasan pelayanan merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan stakeholder atas pelayanan yang diberikan Puslatbang PKASN, maka dibuat 3 (tiga) survei berdasarkan jenis pelayanan yang ada di Puslatbang PKASN yaitu survei atas pelayanan pelatihan, survei atas pelayanan penilaian kompetensi dan survei internal atas pelayanan bagian umum. Berikut hasil survey pelayanan di lingkungan Puslatbang PKASN :

Pelayanan	Hasil Survey
Pelatihan Kepemimpinan	92,40%
Pelatihan Teknis	91,13%
Latsar CPNS	91,64%
Pemetaan Kompetensi	96,68%
Bagian Umum	83,40%

Rencana aksi ini berkaitan dengan area peningkatan pelayanan publik juga terkait dengan sasaran RB yaitu Pelayanan Publik yang Prima. Adapun output yang dihasilkan yaitu persentase hasil kepuasan pelayanan di Puslatbang PKASN. Manfaat dari rencana aksi ini yaitu manajemen Puslatbang PKASN dapat mengetahui sejauh mana kepuasan stakeholder atas pelayanan yang ada di Puslatbang PKASN dan manajemen dapat memperbaiki hal apa saja yang dirasa masih kurang memuaskan bagi stakeholder

S. Program Magang (Kampus Merdeka)

Program Magang Kampus Merdeka di Puslatbang PKASN merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau pelajar SMK untuk belajar dari lingkungan kerja Puslatbang PKASN. Dalam program magang ini peserta magang akan didampingi oleh mentor yang merupakan perwakilan ASN dari masing masing unit kerja.

Rencana aksi ini terkait dengan area peningkatan kualitas pelayanan publik dan terkait dengan sasaran RB yaitu Pelayanan Publik yang Prima. Adapun output dari rencana aksi ini yaitu terlaksananya program magang yang memberikan pengalaman bekerja di lapangan bagi mahasiswa atau pelajar SMK.

Adapun manfaat dari rencana aksi ini yaitu adanya sharing ilmu antara mahasiswa/pelajar SMK dengan pegawai (khususnya mentor magang) dimana mahasiswa/pelajar SMK memperoleh ilmu mengenai bekerja di lapangan dan pegawai (mentor) mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri sebagai pegawai yang dapat membimbing yang dapat berguna bagi pengembangan skill kepemimpinan pegawai kedepannya



Gambar 36. Program Magang Kampus Merdeka Puslatbang PKASN

BAB III

PRESTASI TAHUN 2022

Puslatbang PKASN merupakan salah satu kompartemen di LAN yang aktif dalam memberikan prestasi bagi lembaga, khususnya dalam bidang tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan. Prestasi ini diraih ditengah tantangan lingkungan strategis yang dinamis dan kian meningkat. Hal ini membuktikan tingginya komitmen segenap elemen di lingkungan Puslatbang PKASN untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik bagi organisasi dan stakeholder. Adapun beberapa prestasi yang diraih pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

- **Satuan Kerja Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil TA 2021**



Penyerahan Penghargaan Satuan Kerja Dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil TA 2021

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Terdapat 4 (empat) aspek dan 13 indikator kinerja yang dinilai.

Pada TA 2021, Puslatbang PKASN memperoleh nilai IKPA sebesar 98.63 dan menjadi peringkat pertama satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik kategori pagu kecil (pagu kurang dari 20 miliar) di KPPN Bandung II. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala KPPN Bandung II kepada KPA Puslatbang PKASN pada tanggal 30 Januari 2022. Prestasi ini sebagai bukti dari komitmen Puslatbang PKASN sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan RB khususnya pada area Akuntabilitas.

- **Peringkat Ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W**



Penyerahan Penghargaan Peringkat Ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W

Laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai akhir atas penggunaan APBN. Pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas tentunya sangat diharapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 4 (empat) kriteria laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Puslatbang PKASN memperoleh penghargaan peringkat ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini sebagai bukti dari komitmen Puslatbang PKASN sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan RB khususnya pada area Akuntabilitas.

- **Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 2 (dua)**

Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina pelatihan untuk ASN, selain mengakreditasi lembaga pelatihan diluar LAN juga mengakreditasi lembaga pelatihan di internal LAN. Puslatbang PKASN telah diakreditasi pada tahun 2022 dan mendapatkan nilai sebesar 91,763 dengan kategori bintang 2 (dua).

Hasil akreditasi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 105/K.1/PDP.09/2022 tanggal 4 Maret 2022. Prestasi ini sebagai bukti dari komitmen Puslatbang PKASN sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan RB khususnya pada Pelayanan Publik.



Penyerahan Penghargaan
Lembaga Pelatihan
Terakreditasi Bintang Dua

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan ditengah tuntutan yang kian berkembang. Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, Puslatbang PKASN berkomitmen untuk melaksanakan RB yang diarahkan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa poin simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi RB Puslatbang PKASN pada tahun 2022 secara umum dapat tercapai dengan baik, walaupun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi kedepannya.
2. Pelaksanaan RB di lingkungan Puslatbang PKASN merupakan respon atas tantangan lingkungan strategis maupun tuntutan stakeholders yang berkembang
3. Prestasi yang diraih pada tahun 2022 merupakan hasil dari komitmen pelaksanaan RB di lingkungan Puslatbang PKASN dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja lembaga.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RB di lingkungan Puslatbang PKASN, terutama untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholders, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Perlunya peningkatan komitmen pada seluruh elemen di lingkungan Puslatbang PKASN, untuk senantiasa memberikan kinerja dan kontribusi terbaik bagi Puslatbang PKASN khususnya dan LAN pada umumnya, serta terlibat aktif dalam proses transformasi melalui pelaksanaan program-program reformasi birokrasi yang ditetapkan.
2. Peningkatan pelayanan baik secara internal maupun eksternal yang berbasis teknologi terintegrasi, sehingga mampu menghasilkan pelayanan prima kepada stakeholders.

3. Penguatan implementasi LAN Corpu melalui aplikasi Flexible Micro Learning sebagai sarana pengembangan kompetensi pegawai yang terintegrasi dalam menunjang kinerja organisasi.
4. Pengembangan “Modern Office” melalui penguatan co-working space dan dukungan sarana dan prasarana yang modern dan inklusif.